

**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di
Kabupaten Boyolali)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

NOVI ANDIANI
B.200 080 039

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2 0 1 2**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi ilmiah dengan judul:

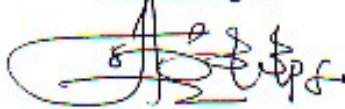
PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN MPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Boyolali)

Yang di tulis oleh: Novi Andiani, NIM: B 200 080 039

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi ilmiah tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

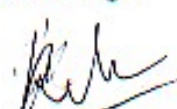
Surakarta, Agustus 2012

Pembimbing II



(Shinta Permata Sari, SE.)

Pembimbing I



(Dr. Sri Retno Indrastanti, M.Si, Ak.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si)

**PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Boyolali)

Oleh :

NOVI ANDIANI

Fakultas Ekonomi Akuntansi

ABSTRACT

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah dan pengaruh implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian jenis survei dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 responden dan diolah menggunakan program SPSS untuk menguji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan t_{hitung} 3,603 dan $\rho = 0,001$); (2) Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (dengan t_{hitung} 5,289 dan $\rho = 0,000$). Hal ini berarti seluruh hipotesis dalam penelitian ini terdukung statistik.

Kata Kunci : *Sistem pengelolaan keuangan daerah, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, fungsi pengawasan keuangan daerah*

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru dalam Latifah dan Sabeni, 2007: 2).

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan *good public governance*, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal ini unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik. Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam

pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2002 : 61).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Suwardjono (2005: 14) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuannya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh Hay (1997) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah : (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial serta penampilan akuntabilitas dan *stewardship*; (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi dalam pemerintahan (Tausikal, 2009: 26).

Lebih lanjut, Mardiasmo (2002: 11) menyatakan bahwa terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Peterson (1994) menegaskan bahwa *improving budgeting* di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber daya. Seperti halnya dikemukakan oleh Newkirk (1986) bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Suwardjono, 2005 dalam Tuasikal, 2009).

Selama ini ada anggapan bahwa lembaga pemeriksa fungsional eksternal tidak mampu mengemban fungsinya dengan efektif, demikian juga lembaga pemeriksa fungsional intern yang berlapis-lapis pada umumnya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik (Damanik, 2001:43). Pemerintah daerah merasa bahwa audit yang dilaku terlalu banyak sehingga terjadi tumpang tindih audit finansial yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional intern maupun ekstern. Tumpang tindih tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan terus-menerus sehingga *auditee* lebih merasakannya sebagai beban daripada bantuan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan. Di samping itu, aparat pemeriksa fungsional pemerintah di daerah dalam menjalankan tugasnya sering mengalami hambatan-hambatan misalnya budaya kurang transparansinya laporan keuangan daerah, terbatasnya team monitoring dalam perencanaan penyusunan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Setyawan (2002) melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja anggaran keuangan daerah pemerintah Kota Malang dilihat dari perspektif akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Analisis rasio keuangan daerah yang digunakan terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Ketergantungan daerah masih tinggi, terutama terhadap penerimaan dari bantuan pemerintah pusat berupa DAU (Dana Alokasi Khusus); (2) Dilihat dari analisis rasio efisiensi, kinerja pemerintah dalam memungut pajak daerah sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yang semakin menurun dari tahun ke tahun; (3) Berdasarkan analisis aktivitas/keserasian menunjukkan

dana APBD masih banyak digunakan untuk kegiatan operasional yang bersifat rutin, sedangkan untuk belanja pembangunan relatif kecil sehingga dapat dikatakan belum optimal; dan (4) Berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa belanja yang dikeluarkan dari tahun ke tahun cenderung semakin besar, kecuali pada tahun anggaran 2000, namun pada posisi pendapatan dari tahun ke tahun semakin menurun, sehingga berakibat pada *surplus* anggaran.

Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan penelitian Abdul Rohman (2009), tetapi penelitian ini menggunakan variabel pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel kinerja sebagai variabel dependen. Penelitian Abdul Rohman (2009) menggunakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini menggunakan metode survei pada tempat dan waktu yang berbeda. Adapun persamaannya adalah penelitian ini menggunakan variabel implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah?
2. Apakah implementasi sistem akuntansi berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah?

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang : 1) Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah dan 2) Pengaruh implementasi sistem akuntansi terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Tjahjanulin Domai, 2002). Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Abdul Halim (2001) mengatakan, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah : oleh karena itu anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran.

Tuntutan mengenai otonomi daerah dan pemerintahan yang demokrasi di daerah sebagai konsekuensi dan implikasi globalisasi. Otonomi selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonomi jika ia menentukan diri sendiri, membuat aturan (Hukum) sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkan kewenangan kekuasaan dan prakasa sendiri (A. Suryadi. C, 2000) dalam (Rohman, 2009). Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai konsekuensinya adalah perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah sebagai manifestasi dari Otonomi Daerah.

B. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002: 12). Dari pengertian tersebut, maka implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdiri dari dua dimensi yaitu:

kemudahan dan kemanfaatan. Kemudahan dan kemanfaatan implementasi sistem akuntansi pemerintahan memungkinkan kebijakan akuntansi diterima semua pihak.

Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan diharapkan mampu menjamin bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan dimana bisa diperiksa segala transaksi yang terjadi di dalam entitas itu, yakni entitas pemerintah. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan (Hendriksen, 2005:79). Adanya sistem akuntansi, pemeriksaan akuntansi dapat dilakukan secara efektif (Dunk dan Pepera, 1997 dalam Rohman, 2009). Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aktivitas yang mencakup: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk didalamnya bagaimana penatausahannya, tahap pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi pengelolaan keuangan daerah terdiri: *planning and budget setting*.

C. Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Menurut (Cahyat dalam Effendy:2010) dalam (Rohman, 2009), pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).

Fungsi pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini merupakan fungsi pengawasan intern yaitu suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan berkaitan dengan keuangan daerah. Dimensi variabel fungsi pemeriksaan keuangan daerah, hal ini meliputi antara lain : (1) mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian intern; (2) pengujian atas pengelolaan informal keuangan dan operasi pemerintah; (3) Pengujian terhadap instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional, dan identifikasi keadaan yang tidak efisien; (4) pengujian terhadap pengendalian non-finansial organisasi.

Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan bahwa : (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran (Alamsyah,

1997:79). Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2002:38).

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk penelitian saat ini. Anita Wulandari (2001) dalam penelitiannya tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah, yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2009), tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan intern dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). Dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi dan memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada Pemerintah daerah di Jawa Tengah. Selain itu implementasi sistem akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) tentang Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari faktor organisasional yang diuji, hanya dukungan atasan yang berpengaruh untuk meningkatkan kegunaan SAKD. Pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan SAKD tidak berhasil dibuktikan. Konflik kognitif tidak berhubungan positif dengan kegunaan SAKD. Konflik afektif berhubungan negatif dengan kegunaan SAKD.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *survey*. Penelitian ini merupakan *field research*, karena dilakukan dalam lingkungan alami yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 80 pegawai. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan keuangannya dan aset daerah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari individu, kelompok-kelompok tertentu, dan juga responden yang telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti yang memiliki data spesifik dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2006: 29).

Sumber data berasal dari data yang diperoleh dari kuestioner yang disebar dan diisi oleh responden yang dimaksud. Kuestioner dibuat dalam bentuk kuestioner secara berstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja. Penyebaran kuestioner terhadap responden dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, untuk selanjutnya membagikan kuestioner tersebut kepada responden.

Pengambilan kembali kuestioner disesuaikan dengan waktu yang telah disepakati dengan DPPKAD Kabupaten Boyolali.

D. Definisi Operasional dan Pengukurannya

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Nur Indriantoro, dan Bambang Supomo, 2002; 63). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu fungsi pengawasan keuangan daerah.
2. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aktivitas yang mencakup: tahap perencanaan, tahap penyusunan dan penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD termasuk di dalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban, dan pengawasan.

- b. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Kedua variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran dalam bentuk kuestioner yang dikembangkan oleh Shield & Young (2008) dalam Siti Nurlaela (2009). Setiap item diberi skor 1 sampai 5, yaitu : skala 5 sangat setuju, skala 4 setuju, skala 3 ragu-ragu, skala 2 tidak setuju dan skala 1 sangat tidak setuju.

E. Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkap sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut. Kuestioner sebagai instrumen penelitian harus bisa mengukur apa yang ingin diukur, sehingga harus teruji validitasnya. Analisa faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor faktor dengan skor total setelah terlebih dahulu mengetahui kekhususan tiap faktor.

2. Uji Reliabilitas

Kuestioner sebagai instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang dijawab dengan “sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Peneliti menggunakan metode *internal consistency* dengan teknik alpha atau sering disebut *cronbach's alpha*.

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan karena penelitian ini menganalisis pengaruh antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Sebagai variabel dependen adalah fungsi pengawasan keuangan daerah. Variabel independennya implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dapat dilihat dari signifikan nilai t yaitu :

$$\text{FPKD} = b_0 + b_1\text{PKD} + b_2\text{ISA} + e$$

Keterangan:

FPKD = Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah

b_0 = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

PKD = Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

ISA = Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

e = Error

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear, variabel-variabel dalam penelitian harus diuji dahulu dengan menggunakan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian gejala, pengujian kenormalan data, multikolinearitas dan pengujian gejala heteroskedastisitas.

a. Pengujian Kenormalan data

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan alat uji sampel *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.

b. Pengujian multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen di antara satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2008: 92). Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *Tolerance Value* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dengan bantuan program SPSS for windows version 16, yang mana apabila nilai *Tolerance Value* di bawah 0,10 dan *VIF* di atas 10, maka data mengalami gejala multikolinieritas.

c. Pengujian gejala heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dan nilai probabilitas (ρ) atau *out* SPSS dengan nilai t_{tabel} . Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\rho > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh masing-masing variabel akan dilihat dari hasil uji t. Sebelum dilakukan uji t akan diuji terlebih dahulu fit model dengan uji F dan koefisien determinasi dengan *adjusted R²*.

Uji F menunjukkan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen adalah signifikan atau tidak signifikan (Ghozali, 2008: 88). Uji F digunakan untuk mengetahui fit model. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $\rho \text{ value} < 0,05$, maka model regresi tepat (fit), artinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah, dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $\rho \text{ value} \geq 0,05$ maka model regresi kurang tepat atau tidak fit.

Uji *adjusted R²* atau uji ketepatan perkiraan menyatakan persentase total variansi dan variabel dependen yang dapat diselesaikan oleh variabel independen dalam model, tingkat ketepatan terbaik dalam regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk yang nilainya antara nol dan satu $0 \leq R^2 \leq 1$ (Gujarati, 1997 : 1). Apabila R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen secara bersama-sama dapat diselesaikan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 0, maka variasi dan variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Uji hipotesis akan menggunakan uji t. Nilai t menunjukkan pengujian variabel independen secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lainnya tetap atau konstan.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Setelah dilakukan pengolahan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows maka diperoleh hasil uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan

bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode enter yaitu dengan melihat pada *Tolerance Value* atau *variance inflation factor (VIF)*. Hasil analisis menunjukkan nilai nilai *VIF* tidak melebihi angka 10, demikian juga nilai *tolerance* tidak lebih dari 1, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Gletser dapat diketahui bahwa semua nilai t_{hitung} dari kedua variabel dependen lebih kecil dari pada t_{tabel} atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

2. Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini digunakan uji *regresi linear* berganda. Hasil dari uji akan menunjukkan apakah ada pengaruh antara variabel sistem pengelolaan keuangan daerah, implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah pada pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS 16.0 for windows* dan secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Variabel	<i>Unstandarized Coefficients B</i>	<i>Std.Error</i>	t_{hitung}	Prob.
Konstanta	4,773			
PKD	0,602	0,167	3,603	0,001
ISA	0,711	0,135	5,289	0,000
F_{hitung}	27,561			
Probabilitas	0,000			
<i>R Square</i>	0,586			
<i>Adj. R Square</i>	0,564			

Sumber: Data Prime Diolah.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS Release 16,00 didapatkan persamaan regresi:

$$FPKD = 4,773 + 0,602PKD + 0,711ISA$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta 4,773 artinya apabila tidak terdapat variabel sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, fungsi pengawasan keuangan daerah tetap dijalankan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali.

Variabel sistem pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien regresi 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sistem pengelolaan keuangan daerah semakin baik maka akan mengakibatkan dukungan yang semakin baik terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

Variabel implementasi sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien regresi 0,711. Hal ini menunjukkan bahwa apabila implementasi sistem akuntansi keuangan daerah semakin baik maka akan mengakibatkan dukungan yang semakin baik terhadap peningkatan fungsi pengawasan keuangan daerah.

Hasil perhitungan uji F, dengan *level of significant* sebesar 0,05, diperoleh F_{hitung} 27,561 dengan nilai probabilitas (ρ) sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), dengan demikian model regresi dalam penelitian ini adalah Fit. Hal ini berarti sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,564, artinya bahwa 56,40% variasi variabel fungsi pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan sisanya yaitu 43,60% dijelaskan oleh faktor yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

B. Hasil Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tiap-tiap variabel independen yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Hasil uji t secara ringkas dapat dilihat pada tabel IV.14.

Tabel 2. Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	signifikan	Keterangan
PKD	3,603	2,021	0,001	H_0 ditolak
ISA	5,289	2,021	0,000	H_0 ditolak

Sumber: Data diolah

1. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji-t untuk hipotesis 1 diperoleh nilai (t_{hitung} sebesar 3,603) lebih besar dari (t_{tabel} sebesar 2,021) dan nilai probabilitas 0,001 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 terdukung secara statistik, artinya sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, yang berarti semakin baik sistem pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik pula fungsi pengawasan keuangan daerah. Hal yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan fungsi pengawasan keuangan daerah agar berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat terlihat dari suatu satuan kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman (2009), tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan intern dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). Dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*), penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi dan memperlancar pelaksanaan fungsi pengawasan intern pada Pemerintah daerah di Jawa Tengah. Selain itu implementasi sistem akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.

2. Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil uji-t untuk Hipotesis 2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,289 dan nilai probabilitas 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_2 terdukung secara statistik, artinya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali, yang berarti semakin baik implementasi sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula fungsi pengawasan

keuangan daerah. Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aktivitas yang mencakup: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk di dalamnya bagaimana penatausahannya, tahap pertanggungjawaban dan pengawasan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Afifah (2004), bahwa salah satu kesimpulannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi, kualitas informasi keuangan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas (2005) yang menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut penelitian Mahmudi (2007), pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendukung operasi rutin harian, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas financial dan melindungi aset pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah diketahui nilai ($\rho = 0,001$). Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai t_{hitung} (3,603) lebih besar dari pada t_{tabel} (2,021) dengan nilai signifikan $0,001 < \alpha = 0,05$ oleh karena itu H_1 terdukung statistik.
- Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah diketahui nilai ($\rho = 0,000$). Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai t_{hitung} (5,289) lebih besar dari pada t_{tabel} (2,021) dengan nilai signifikan $0,001 < \alpha = 0,05$ oleh karena itu H_2 terdukung statistik.

Saran-saran

Bagi penelitian yang selanjutnya harus dapat digeneralisasikan pada objek penelitian dengan memilih dan memperluas lokasi penelitian yang berbeda dan tidak hanya satu kabupaten saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah N. N. 2004. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik (Survei pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat)*. Disertai Doktor. pada Universitas Padjajaran Bandung: Bandung.
- Alamsyah. 1997. *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis Magister Akuntansi Publi. Univ. Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Baridwan. Zaki. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: FE YKPN.
- Boyton, W.C. dan W.G. Kell. 2006. *Modern Auditing*, 8th Ed., John Wiley & Sons, Inc.
- Damanik. U. 2001. Paradigma Baru Pengawasan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP)*: 2(1): 19-42.

- Domai, Tjahjanulin. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah : Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Administrasi Negara* Vol II No. 02 Maret 2002, hal:51-56.
- Fachruzaman. 2010. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. *Simpium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Fanindita, Fanina. 2010. Rekrutmen Politik Terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen (Suatu studi terhadap DPRD Tingkat I Periode 2004-2009 di Sumatera Utara). *Skripsi S1*. USU.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Menggunakan Program SPSS*. Semarang: BPFE UNDIP.
- Gudjarati. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Hay, Leon E., 1997. *Accounting for Governmental And Non-profit Entities*, 9th Ed., Boston : Richard D. Irwin Inc..
- Hendriksen, Eldon S., 2005, *Teori Akuntansi*, Terjemahan oleh Marianus Sinaga, E elima, Jakarta: Erlangga.
- Indriantoro Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara Nomor: Kep-09/AK/2002 tentang “Pedoman Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen/Lembaga menjelaskan”.
- Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *SNA X*. UNDIP Semarang.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138*.
- Petersen Mitchell A., 2009, Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches, *Review of Financial Studies* 22, 435-480.
- Rohman, Abdul. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal MAKSI*, Vol. 7, no. 2: 206-220. Agustus.
- _____, 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1 : 21-32. Februari.
- Sardjito, Bambang dan Osmad Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *SNA X*. UNHAS, Makasar, 26-28 Juli.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods of Business*. Salemba Empat

- Setyawan, Setu. 2002. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat Dari Prespektif Akuntabilitas*. S1 (Tidak Dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sri Dewi Wahyundaru. 2001. *Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah*. Suara Merdeka. Edisi 21 Februari.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Susmanto, Bintang. 2008. Pengawasan Intern pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
<http://www.menkokesra.go.id/content/view/117/323/>
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Tuasikal, Askam. 2009. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. Juni. Hlm. 66-88.
- Tim Pokja. 2001, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Jakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, *Jakarta*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, *Jakarta*.
- Wilkinson, et al. 2000. *Accounting information systems: Essential concepts and applications (4th ed.)*. New York: John Wiley and sons. Inc.